



**PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR 126 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TRANGKIL**

**KABUPATEN PATI TAHUN 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I</b>
I. 1 Latar Belakang.....	I.1
I. 2 Landasan Hukum.....	I.2
I. 3 Maksud dan Tujuan .....	I.3
I. 4 Sistematika Penulisan .....	I.4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>II</b>
II. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	II.1
II. 2 Sumber Daya Kecamatan.....	II.7
II. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan .....	II.16
II. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trangkil.....	II.25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III</b>
III. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Trangkil .....	III.1
III. 2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	III.9
III. 3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah .....	III.13
III. 4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III.17
III. 5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	III.19
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV</b>
IV. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Trangkil .....	IV.1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V</b>
V. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Trangkil.....	V.1

<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI</b>
VI.1 Program dan Kegiatan .....	VI.1
<b>BAB VII KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII.1</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil .....	7
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Trangkil .....	18

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan .....	II.4
Tabel II. 2	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan .....	II.7
Tabel II. 3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan .....	II.7
Tabel II. 4	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan .....	II.8
Tabel II. 5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan .....	II.9
Tabel II. 6	Sarana Prasarana Kecamatan .....	II.9
Tabel II. 7	Kawasan Perencanaan Dilingkup Kecamatan Trangkil .....	II.12
Tabel II. 8	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur di Kecamatan Trangkil .....	II.13
Tabel II. 9	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Trangkil .....	II.14
Tabel II. 10	Profil Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Trangkil .....	II.14
Tabel II. 11	Profil Penduduk Menurut Jenis Agama di Kecamatan Trangkil .....	II.15
Tabel II. 12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Trangkil Kab. Pati .....	II.17
Tabel II. 13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Trangkil Kab. Pati .....	II.22
Tabel II. 14	Analisa Untuk Tantangan dan Peluang .....	II.26
Tabel II. 15	Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan .....	II.29
Tabel III. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	III.1
Tabel III. 2	Data Dukung Masalah Pokok .....	III.4
Tabel III. 3	Data Dukung Masalah .....	III.5
Tabel III. 4	Data Dukung Akar Masalah .....	III.6
Tabel III. 5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Trangkil Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	III.10

Tabel III. 6	Telaah Renstra Perangkat Daerah .....	III.15
Tabel III. 7	Telaah KLHS Terhadap Kecamatan Trangkil .....	III.18
Tabel III. 8	Hasil Analisa, Telaah dan Realisasi Kinerja Kecamatan .....	III.19
Tabel IV. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Trangkil .....	IV.2
Tabel V. 1	Peluang dan Pendorong Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan .....	V.1
Tabel V. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	V.4
Tabel VI. 1	Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati .....	VI.2
Tabel VII. 1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII.1

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI  
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-undang...



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 64);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 42), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 12 Desember 2020

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 12 Desember 2020

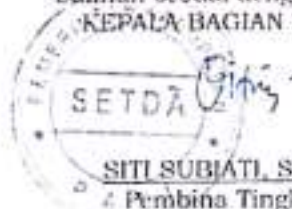
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 126 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI PATI NOMOR 42 TAHUN  
2018 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN TRANGKIL  
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-  
2022.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruangan, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat( 2) mengamanatkan bahwa "Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kecamatan Trangkil sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai kewajiban menyusun rencana strategis Kecamatan Trangkil.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RENSTRA 2017-2022, serta amanat peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tertera dalam pasal 343 ayat (9) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Pasal tersebut sebagai dasar penyesuaian kegiatan dalam perubahan RENSTRA. Berikutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diamanatkan setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan pemetaan dari program/kegiatan lama ke Program/kegiatan/sub kegiatan baru. Amanat tersebut mengakibatkan terjadinya perbaikan indikator kegiatan yang masih bersifat hasil aktivitas, hal tersebutlah yang mendasari adanya perbaikan dan penajaman indikator output serta penyesuaian target kegiatan dalam perubahan RENSTRA.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 - 2022;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Strategis Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud perubahan RENSTRA Kecamatan Trangkil

Renstra Kecamatan Trangkil merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5(lima) tahun mendatang yang mana sudah dilaksanakan 2 (dua) tahun. Penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Trangkil untuk Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan untuk:

- 1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.
- 2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Kecamatan Trangkil yang ditetapkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan.
- 3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus ditindaklanjuti dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
- 4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun



- 5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Trangkil dalam kurun waktu 5(lima) tahun mendatang, yaitu: Tahun 2017-2022.

### **1.3.2 Tujuan Perubahan RENSTRA Kecamatan Trangkil**

Perubahan Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2017 –2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Trangkil dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2017-2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Kabupaten Pati dengan Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2017 – 2022.
- 2). Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan(RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di Wilayah Kecamatan Trangkil
- 3). Sebagai dasar pengukuran kinerja 5 (lima) tahun mendatang.
- 4). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan perubahan . Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA saat ini adalah RENSTRA perubahan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan PD Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Pati.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun mendatang;

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil**

##### **2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Trangkil terdiri atas:

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)  
KANTOR KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**



**Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil**

**2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

**Tabel II.1.**

**Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan**

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.</li> <li>- Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan.</li> <li>- Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja.</li> <li>- Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya.</li> <li>- Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.</li> </ul>
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan keurahan sesuai kerja Camat.</li> <li>- Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.</li> <li>- Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa.</li> <li>- Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> </ul>
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.</li> <li>- Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan.</li> <li>- Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan.</li> <li>- Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.</li> </ul>
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>- Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Memberhentikan anggota Badan</li> </ul>

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.</li> <li>- Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya.</li> <li>- Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.</li> <li>- Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan.</li> <li>- Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.</li> <li>- Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.</li> <li>- Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</li> <li>- Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan.</li> <li>- Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan.</li> <li>- Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi</li> </ul>



No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

**Tabel II.2.**

**Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan**

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2020

**2.2 Sumber Daya Kecamatan**

**2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Pegawai Kecamatan Trangkil berjumlah 19 orang, terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel II.3**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Trangkil	2		3	4	5	5	19	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubag Umum &	-	-	-	1	-	-	1	

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	Kepeg								
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	1	2	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1	2	
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	1	1	
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	1	2	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	3	5	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2020.

**Tabel II.4**

**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Trangkil	-	-	4	2	-	1	8	5	-	-	12	5
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2020

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
9	40-44	954	47%	1065	53%	2019	100
10	45-49	848	48%	912	52%	1760	100
11	50-54	446	50%	449	50%	895	100
12	55-59	1662	49%	1751	51%	3413	100
13	60-64	1605	50%	1610	50%	3215	100
14	65-69	1314	49%	1381	51%	2695	100
15	70-74	2616	49%	2675	51%	5291	100
16	75+	2754	49%	2914	51%	5668	100

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam angka 2019

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

**Tabel II.9**

**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Trangkil**

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	4.743	4.924	9.667	20,78%
2	Belum tamat SD/MI	2.492	2.303	4.795	10,31%
3	SD/MI	9.618	9.923	19.541	33,94%
4	SMP/MTs	4.521	4.577	9.098	20,91%
5	SMA/SMK/MA	5.521	5.120	10.641	11,50%
6	DI/DII	92	119	211	0,45%
7	DIII	225	301	526	0,86%
8	S1	707	707	1.414	2,30%
9	S2	41	22	63	0,10%
10	S3	2	1	3	0,00%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

**Tabel II.10**

**Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Trangkil**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
----	-----------------	---	---	--------	---

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.946	6.831	13.777	22,44%
2	Mengurus rumah tangga	8	7.554	7.562	12,32%
3	Pelajar/mahasiswa	5.175	4.213	9.388	15,29%
4	Pensiunan	146	45	191	0,31%
5	PNS	146	45	191	0,31%
6	TNI	21	1	22	0,004%
7	Polri	25	3	28	0,05%
8	Pedagang	25	3	28	0,05%
9	Petani/pekebun	2.939	1.853	4.792	7,80%
10	Peternak	32	6	38	0,06%
11	Nelayan	87	2	89	0,14%
12	Industri	41	42	83	0,14%
13	Konstruksi	12	1	13	0,02%
14	Transportasi	38	0	38	0,06%
15	Karyawan swasta	2.685	1.716	4.401	7,17%
16	Karyawan BUMN	30	12	42	0,07
17	Karyawan BUMD	5	3	8	0,01%
18	Karyawan Honoror	46	34	80	0,13%
19	Buruh harian lepas	447	174	621	1,01%
20	Buruh tani	1.532	1.345	2.877	4,69%
21	Wiraswasta	54	4	58	0,09%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

**Tabel II.11**

**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Trangkil**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	29.731	31.062	60.793	97,7
2	Kristen	639	690	1.329	2,1
3	Katolik	21	25	46	0,2
4	Hindu	0	0	0	0
5	Budha	0	0	0	0
6	Konghuchu	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	0	0	0	0

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

## **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan**

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan**

Terkait dengan kinerja Kecamatan Trangkil selama dua tahun sebelumnya, menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Trangkil dalam kurun periode 2018-2019 sebagai berikut:

**Tabel II.12**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TRANGKIL**  
**KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penanganannya pelanggaran K3 di kecamatan		100%	100%	100%	100%	100	100
2	Persentase pos kamplang aktif		60%	63%	63%	64%	105	102
3	Persentase anggota Limmas aktif		60%	65%	61%	66%	102	102
4	Rasio Poskamling		4.2	4.5	6.4	6.4	152	142
5	Rasio Anggota Limmas		0.031	0.032	0.031	0.032	100	100
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan		0.6569	0.7522	0.6569	0.7522	100	100
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100%	100%	100%	100%	100	100
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)		0.7125	0.7425	0.7125	0.7425	100	100
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		0.6027	0.6437	0.6027	0.6437	100	100
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0.6419	0.6708	0.6419	0.6708	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%	100	100
12	Persentase LPMD aktif		40%	50%	46%	54%	115	108
13	Persentase PKK desa aktif		82%	85%	84%	92%	102	108
14	Persentase Karang Taruna aktif		44%	48%	46%	85%	105	177
15	Persentase RT/RW aktif		73%	76%	76%	85%	104	112
16	Persentase Posyandu aktif		75%	80%	85%	85%	113	106
17	Persentase penyaluran rastra		100%	100%	100%	100%	100	100
18	Persentase penyaluran PKH		100%	100%	100%	100%	100	100
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)		100%	100%	100%	100%	100	100
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan		60%	65%	56.69%	79.31%	94	122
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		65%	70%	100%	100%	154	143
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten		6%	8%	7%	11%	117	137

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
9	40-44	954	47%	1065	53%	2019	100
10	45-49	848	48%	912	52%	1760	100
11	50-54	446	50%	449	50%	895	100
12	55-59	1662	49%	1751	51%	3413	100
13	60-64	1605	50%	1610	50%	3215	100
14	65-69	1314	49%	1381	51%	2695	100
15	70-74	2616	49%	2675	51%	5291	100
16	75+	2754	49%	2914	51%	5668	100

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam angka 2019

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

**Tabel II.9**

**Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Trangkil**

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	4.743	4.924	9.667	20,78%
2	Belum tamat SD/MI	2.492	2.303	4.795	10,31%
3	SD/MI	9.618	9.923	19.541	33,94%
4	SMP/MTs	4.521	4.577	9.098	20,91%
5	SMA/SMK/MA	5.521	5.120	10.641	11,50%
6	DI/DII	92	119	211	0,45%
7	DIII	225	301	526	0,86%
8	S1	707	707	1.414	2,30%
9	S2	41	22	63	0,10%
10	S3	2	1	3	0,00%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

**Tabel II.10**

**Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Trangkil**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
----	-----------------	---	---	--------	---



No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.946	6.831	13.777	22,44%
2	Mengurus rumah tangga	8	7.554	7.562	12,32%
3	Pelajar/mahasiswa	5.175	4.213	9.388	15,29%
4	Pensiunan	146	45	191	0,31%
5	PNS	146	45	191	0,31%
6	TNI	21	1	22	0,004%
7	Polri	25	3	28	0,05%
8	Pedagang	25	3	28	0,05%
9	Petani/pekebun	2.939	1.853	4.792	7,80%
10	Peternak	32	6	38	0,06%
11	Nelayan	87	2	89	0,14%
12	Industri	41	42	83	0,14%
13	Konstruksi	12	1	13	0,02%
14	Transportasi	38	0	38	0,06%
15	Karyawan swasta	2.685	1.716	4.401	7,17%
16	Karyawan BUMN	30	12	42	0,07
17	Karyawan BUMD	5	3	8	0,01%
18	Karyawan Honorer	46	34	80	0,13%
19	Buruh harian lepas	447	174	621	1,01%
20	Buruh tani	1.532	1.345	2.877	4,69%
21	Wiraswasta	54	4	58	0,09%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

**Tabel II.11**

**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Trangkil**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	29.731	31.062	60.793	97,7
2	Kristen	639	690	1.329	2,1
3	Katolik	21	25	46	0,2
4	Hindu	0	0	0	0
5	Budha	0	0	0	0
6	Konghuchu	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	0	0	0	0

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

## **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan**

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan**

Terkait dengan kinerja Kecamatan Trangkil selama dua tahun sebelumnya, menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Trangkil dalam kurun periode 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel II.12  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TRANGKIL  
 KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan		100%	100%	100%	100%	100	100
2	Persentase pos kampling aktif		60%	63%	63%	64%	105	102
3	Persentase anggota Linmas aktif		60%	65%	61%	66%	102	102
4	Rasio Poskamling		4.2	4.5	6.4	6.4	152	142
5	Rasio Anggota Linmas		0.031	0.032	0.031	0.032	100	100
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan		0.6569	0.7522	0.6569	0.7522	100	100
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100%	100%	100%	100%	100	100
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)		0.7125	0.7425	0.7125	0.7425	100	100
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		0.6027	0.6437	0.6027	0.6437	100	100
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0.6419	0.6708	0.6419	0.6708	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Capaian		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rasra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%	100	100
12	Persentase UPMID aktif		40%	50%	46%	54%	115	108
13	Persentase PKK desa aktif		82%	85%	84%	92%	102	108
14	Persentase Karang Taruna aktif		44%	48%	46%	85%	105	177
15	Persentase RT/RW aktif		73%	76%	76%	85%	104	112
16	Persentase Posyandu aktif		75%	80%	85%	85%	113	106
17	Persentase penyaluran rasra		100%	100%	100%	100%	100	100
18	Persentase penyaluran PKH		100%	100%	100%	100%	100	100
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)		100%	100%	100%	100%	100	100
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan		60%	65%	56,69%	79,31%	94	122
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDDes		65%	70%	100%	100%	154	143
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten		6%	8%	7%	11%	117	137

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		60%	65%	62%	70%	103	108
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPd kabupaten		6%	8%	7%	11%	117	137
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		89%	90%	92%	92%	103	102
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan		78%	80%	79%	83%	101	104
29	Persentase keterisian data profil kecamatan		55%	60%	61%	61%	111	102
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa		65%	75%	70%	80%	108	107
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan		82%	85%	92%	97%	112	114

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu		91%	92%	92%	92%	101	100
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan		77%	79%	77%	85%	100	108
34	Pertumbuhan pemohon Paten		40	45	58	53	145	117
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% ( x < 100%)) terjadi pada tahun 2018 dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan, akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% ( x > 100%)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

Kinerja pelayanan kecamatan Trangkil diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel II.13**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TRANGKIL**  
**KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	260,431	266,147	253,928	254,880	91,55	98,72	0.62	9.52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	105,652	136,042	105,235	135,942	100.00	82,50	6.30	3.72
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11,600	12,684	10,400	11,081	100.00	78,88	10.84	0.1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,044	5,538	5,538	5,537	100.00	100.00	4.94	(0.01)
Program Penataan Administrasi Kependudukan	22,781	24,980	22,781	21,985	100.00	100.00	2.2	7.96
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	13,610	15,050	13,610	15,045	100.00	100.00	14.4	14.35



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	24,182	24,303	24,182	24,303	100.00	100.00	1.21	1.21
Program Pengembangan Data/ Informasi	3,498	3,156	3,498	3,156	100.00	100.00	3.42	3.42
Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-	4,690	-	4,675	0	100.00	0.15	100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12,740	13,417	12,738	13,417	100.00	100.00	6.77	6.79
Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	8,175	5,287	8,125	5,277	100.00	100.00	2.88	2.88
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	16,935	59,583	16,935	59,452	100.00	100.00	4.26	4.25

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Dalam penentuan proyeksi anggaran di RENSTRA jumlah anggaran tiap - tiap perangkat daerah mengacu pada kapasitas riil anggaran di RPJMD yang mana struktur anggarannya sudah dibagi dalam (P1) untuk progra wajib mengikat, (P2) untuk program prioritas dan (P3) program pendukung visi dan misi kepala daerah (P3). Program yang ada di Kecamatan Trangkil hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut hampir 75% memiliki rasio yang seimbang ( $100\% \leq x < 100\%$ ), dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Program yang 25% masuk kategori kurang baik ( $x > 100\%$ ) terjadi pembengkakan anggaran, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan program yang mungkin disebabkan karena kurangnya data dan informasi yang ada.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2019 ditemukan bahwa program di Kecamatan Trangkil ada yang baik ( $100\% \leq x < 100\%$ ) dan kurang baik ( $x > 100\%$ ). Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hampir 75% yang rasio anggarannya bisa dianggap baik. Ketercapaian itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2019 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan RENJA sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Trangkil**

### **2.4.1 Analisis RENSTRA Perangkat Daerah terhadap tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Trangkil**

Kecamatan Trangkil merupakan Perangkat Daerah yang termasuk dalam urusan penunjang kewilayahan, dimana urusan tersebut berfungsi menunjang pelayanan masyarakat yang mendukung keberhasilan visi dan misi kepala daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang. Kecamatan Trangkil memberikan dukungan terhadap Misi I untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, Misi III untuk pemberdayaan masyarakat dan Desa, Misi IV untuk perencanaan, dan Misi VI untuk Penanaman modal. Dari analisa RENSTRA Perangkat Daerah dengan urusan diatas mempunyai kesamaan sasaran dalam mendukung tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, capaian sasaran yang hampir sama secara tidak langsung juga merupakan tanggungjawab Kecamatan Trangkil dalam memberikan kontribusi capaian kinerja terhadap perangkat daerah tersebut, kinerja sasaran meliputi :

- 1) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten dengan target capaian akhir 88
- 2) Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan target capaian akhir 99%
- 3) Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD dengan target capaian akhir 100%
- 4) Lama Proses Perizinan dengan target capaian akhir 3 hari
- 5) Persentase Surat Keterangan Pindah Datang dengan target capaian akhir 100%
- 6) Persentase Kepemilikan KK dengan target capaian akhir 100%
- 7) Persentase Kepemilikan KTP dengan target capaian akhir 95%

Sasaran kecamatan merupakan turunan dari tujuan RPJMD dan selaras dengan sasaran perangkat daerah serta adanya kesamaan program. dari hal tersebut dapat analisa permasalahan di kecamatan terhadap sasaran OPD sehingga diketahui tantangan dan peluang yang ada sebagaimana Tabel II.14 berikut :

Tabel II.14

Analisa Untuk Tantangan dan Peluang

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Masih kurangnya bentuk pelayanan petugas LINMAS terhadap jumlah masyarakat yang harus dilayani	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Trangkil yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan SATPOL yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan LINMAS
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa	1. LPMD di Desa masih banyak yang tidak diberdayakan dalam perencanaan, melaksanakan dan pengendalian pembangunan desa , sehingga mempengaruhi pembangunan yang ada dan berdampak pada lingkungan serta mempengaruhi Peningkatan produktivitas ekonomi desa, karena pemberdayaan	1. Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD 2. Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunya target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa 1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES 2. Peningkatan

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
		2. Kurang berfungsinya koordinasi yang dilaksanakan oleh RT/RW terhadap permasalahan lingkungan di masyarakat	1. Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga  2. Kesejahteraan yang sesuai bagi koordinator ditingkat terendah (RT/RW) belum ada perhatian/kebijakan dari pemerintah	BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet  Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
		1. Masih banyak PKK dan Karang Taruna desa yang tidak berjalan/bergerak secara rutin  2. Belum maksimalnya penyelenggaraan	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata  Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES  1. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
		Posyandu di desa	posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa</li> <li>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi operasional tentang program/kegiatan di perangkat daerah dirumuskan lebih jelas</li> <li>Ketatnya proses verifikasi usulan kecamatan oleh OPD pengampu kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya pembekalan pembelajaran bagi vasilitator penjangkaran usulan kegiatan</li> <li>Adanya program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam RKPD</li> </ol>
4	Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD	Keterisian Data monografi kecamatan belum maksimal terpenuhi dan validasi data belum semuanya dapat pertanggungjawabkan	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya base data dari BAPPEDA dan DISKOMINFO yang dapat dijadikan acuan data</li> <li>Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia</li> </ol>
5	Lama Proses Perizinan	Belum optimalnya pelayanan permohonan perijinan	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
6	Persentase Surat Keterangan Pindah Datang, KK dan KTP	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan  Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

Dari analisis diatas dapat dilihat tantangan dan peluang yang timbul dari permasalahan yang ada sebagai faktor dari luar sesuai dengan kondisi saat ini.

#### 2.4.2 Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Analisa Kecamatan Trangkil terhadap KLHS dilihat dari aspek sosial yaitu kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang ada seperti pada tabel berikut :

Tabel II.15

Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

No.	ISU KLHS	Program Kecamatan	Tantangan	Peluang
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	1. Ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD  1. Pemerataan pembangunan penunjang perekonomian	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa

No.	ISU KLHS	Program Kecamatan	Tantangan	Peluang
		Peringkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Adanya Pengawasan dan evaluasi terhadap masa berlaku perizinan dari OPD terkait	Pelimpahan kewenangan terkait pelayanan perijinan di kecamatan

Tantangan tersebut diatas akan menjadi masukan dalam penentuan isu strategis dan peluang yang ada akan menjadi usulan dalam perumusan strategi pembangunan.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor - faktor internal untuk mempertajam perumusan isu - isu strategis adalah sebagaimana berikut :

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Trangkil**

Kecamatan Trangkil sesuai tugas dan fungsinya mengampu 4 (empat) misi sebagai bentuk dukungan kepada kepala daerah dalam menyelesaikan visi dan misi-nya. Misi yang terjemahkan dalam tujuan sudah menjadi ketetapan dalam RPJMD Kabupaten Pati, dari tujuan tersebut secara alur perencanaan diturunkan kedalam sasaran, strategi dan arah kebijakan menggunakan kerangka logis (cascading). Hasil dari alur perencanaan tersebut akan dilihat permasalahan yang ada sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya Poskamling yang aktif dan masih kurangnya pelayanan anggota LINMAS kepada masyarakat	Rasio Poskamling dalam satu desa masih kurang dan rasio anggota LINMAS terhadap masyarakat masih belum memenuhi	Belum optimalnya koordinasi serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat
2	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan	Belum aktifnya LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu di desa	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL),		
3	Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	<p>1. Penyaluran rastra, PKH kepada masyarakat desa yang membutuhkan masih kurang tepat, cepat dan efektif</p> <p>2. Pemerataan penyaluran bantuan keagamaan belum maksimal</p>	<p>1. Rendahnya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam penanggulangan kemiskinan diwilayah kecamatan</p> <p>1. Kurangnya koordinasi dalam penanganan masalah keagamaan diwilayah kecamatan</p>
4	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat belum sepenuhnya memuaskan	Lebih rendah/sedikit dokumen kependudukan yang dikeluarkan dibandingkan permintaan yang masuk
5	Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Masih rendahnya keterisian data dan validasi data monografi kecamatan serta profil kecamatan	Belum maksimalnya koordinasi pemetaan, pengumpulan dan verifikasi data yang dibutuhkan kecamatan dalam penyusunan monografi dan profil
6	Sedikitnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan tertampung dalam Musrenbang Kabupaten	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti dan menghadiri Musrenbang tingkat Desa serta Musrenbang tingkat Kecamatan	Belum pahamnya masyarakat akan kebutuhan yang prioritas dan batasan - batasan kewenangan untuk menjadi usulan dalam musrenbang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadiri, mengikuti dan mengusulkan kebutuhan sesuai skala prioritas pada Musrenbang tingkat Desa dan Musrenbang tingkat Kecamatan	Belum pahamnya masyarakat akan kebutuhan yang menjadi prioritas wilayahnya  Belum pahamnya masyarakat terkait OPD yang menangani usulan mereka dan batasan – batasan kewenangan yang bisa diusulkan
7	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang diberlakukan	Laporan keuangan desa masih banyak yang tidak tepat waktu dan belum semua desa menyusun laporan keuangan sesuai standar pelaporan	Belum maksimalnya pembinaan dan pendampingan pengelolaan administrasi keuangan desa yang diberikan
8	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Masih rendahnya sistem/bentuk pelayanan perizinan kepada masyarakat	Masih rendah/lebih sedikit dokumen izin yang dikeluarkan dibandingkan permintaan perizinan yang ada

Dari tabel diatas dapat dilihat seberapa banyak permasalahan yang muncul dari misi yang didukung oleh kecamatan Trangkil antara lain masalah pokok yang mencapai 8 masalah, masalah mencapai 9 masalah, dan akar masalah sebanyak 9 masalah.

Permasalahan yang ada akan didukung oleh data sebagai dasar adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Trangkil. Data pendukung terbagi dalam tiga area yaitu data masalah pokok berisi data pembentuk dari indikator kinerja (sasaran), data masalah

berisi data pembentuk dari indikator kinerja (program) dan akar masalah yang merupakan data hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Trangkil, data dukung ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Data Dukung Masalah Pokok**

NO.	POKOK MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	DATA SESUAI KEADAAN
			2018	2019
1.	Jumlah pos kamling di Kecamatan Trangkil	Buah	206	206
2.	Jumlah anggota linmas di Kecamatan Trangkil	Orang	245	311
3.	Jumlah lembaga masyarakat yang ada di Kecamatan Trangkil	Buah	80	80
4.	Jumlah fakir/miskin di Kecamatan Trangkil	Orang	3779	4329
5.	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan)	Buah	50	51
6.	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan di Kecamatan Trangkil	Blangko	3988	1994
7.	Jumlah pelayanan perijinan keseluruhan di Kecamatan Trangkil	Blangko	68	78
8.	Jumlah data monografi kecamatan Trangkil yang terisi	Buah	2	2
9.	Jmlah desa di Kecamatan Trangkil	Desa	16	16
10.	Jumlah penduduk Kecamatan Trangkil	Orang	61.871	62.189
11.	Jumlah rumah ibadah se Kecamatan Trangkil	Buah	278	278

Data pendukung pada tabel masalah pokok diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja sasaran yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan jenis data yang sifat sebagai elemen data.

**Tabel III.3**  
**Data Dukung Masalah**

NO.	MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	
			2018	2019
	Jumlah seluruh LPMD = 16. desa	Orang	160	160
	Jumlah PKK seluruhnya = 16 desa	Orang	374	374
	Jumlah karang taruna keseluruhan = 16 desa	Orang	320	320
	Jumlah RW se Kecamatan Trangkil	Buah	60	60
	Jumlah RT se Kecamatan Trangkil	Buah	374	374
	Jumlah posyandu se Kecamatan Trangkil	Buah	84	84
	Jumlah PKH se Kecamatan Trangkil	Buah	9	11
	Jumlah (rumah ibadah, takmir dll) yang seharusnya menerima bantuan keagamaan se Kecamatan Trangkil	Buah	278	278
	jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	16 Desa	830	850
	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	16 Desa	3200	3260
	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	16 Desa	256	272
	Jumlah laporan keuangan desa se Kecamatan Trangkil	16 Desa	16	16

Data pendukung pada tabel masalah diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja program yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan data yang sifatnya sebagai sub elemen data.

Tabel III.4  
Data Dukung Akar Masalah

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin laki - laki	Orang	30.242	30.391
	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perempuan	Orang	31.629	31.798
	Sex Ratio Penduduk		95.58	95.61
	Kepadatan Penduduk	perkilo	1397	1452
	Jumlah Desa Tertinggal**		-	-
	Jumlah Desa Berkembang**	Desa	16	16
	Jumlah Desa Mandiri**		-	-
	Jumlah Desa Agraris**	Desa	16	16
	Jumlah Desa Industri**		-	-
	Jumlah Desa Nelayan**		-	-
	Jumlah Desa Wisata**		-	-
	Jumlah Aparat Linmas aktif	Orang	245	311
	Jumlah Aparat Linmas tidak aktif		-	-
	Jumlah Pos Kamling aktif	Buah	206	206
	Jumlah Pos Kamling tidak aktif		-	-
	Jumlah Karang Taruna (KT) aktif	Lembaga	16	16
	Jumlah Karang Taruna (KT) tidak aktif		-	-
	Jumlah PKK Aktif **	Lembaga	17	17
	Jumlah PKK Tidak Aktif **		-	-
	Lembaga Pemberdayaan	Desa	16	16

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	Masyarakat Desa Aktif**			
	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif*		-	-
	Jumlah RW aktif	RW	60	60
	Jumlah RW tidak aktif	-	-	-
	Jumlah RT aktif	RT	374	374
	Jumlah RT tidak aktif	-	-	-
	Jumlah Posyandu aktif		60	60
	Jumlah Posyandu tidak aktif		-	-
	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif	Lembaga	80	80
	Jumlah lembaga kemasyarakatan tidak aktif	-	-	-
	Jumlah fakir/miskin penerima bantuan sesuai daftar penerima RASTRA (rastra, PKH)	Orang	2602	2602
	Jumlah penerima bantuan keagamaan sesuai daftar penerima	Orang	278	278
	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) yang terealisasi dalam RKPD	Buah	9	12
	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu yang terlayani	Buah	3988	
	Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu yang terlayani	Buah	68	78
	Jumlah keterisian data monografi kecamatan	Buah	2	2
	Jumlah keterisian data	Buah	16	16

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	profil desa			
	Jumlah desa yang administrasi laporan pengelolaan keuangan desa tepat waktu	Desa	16	16
	Jumlah desa yang administrasi laporan pengelolaan keuangan desa yang sudah tertib dan sesuai standar	Desa	16	16
	Jumlah Masjid se Kecamatan Trangkil	Buah	32	32
	Jumlah Langgar/Mushola se Kecamatan Trangkil	Buah	252	252
	Jumlah Surau se Kecamatan Trangkil	-	-	-
	Jumlah Gereja Kristen se Kecamatan Trangkil	Buah	10	10
	Jumlah Gereja Katolik se Kecamatan Trangkil	-	-	-
	Jumlah Kapel se Kecamatan Trangkil	-	-	-
	Jumlah Pura se Kecamatan Trangkil	-	-	-
	Jumlah Kuil se Kecamatan Trangkil	-	-	-
	Jumlah Vihara Kecamatan Trangkil	-	-	-
	Jumlah Klenteng se Kecamatan Trangkil	-	-	-

Data pendukung pada tabel akar masalah diatas merupakan metadata dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung realisasi kinerja dari target yang sudah direncanakan. data sifatnya sebagai sub elemen data.



### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pati periodetahun 2017-2022 adalah :

"MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK."

Visi tersebut diterjemahkan dengan 8 (delapan misi) untuk mewujudkan sebagai berikut :

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pati periodetahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ketercapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib didukung oleh Kecamatan Trangkil, diselaraskan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan pada sub bab 3.1 diatas untuk dasar penelaahan guna mendapatkan faktor – faktor penghambat dan pendukung yang ada di Kecamatan Trangkil :

Tabel III.5  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan  
 Trangkil Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program  
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi I Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling  Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Trangkil	Kebijakan Kecamatan Trangkil dalam pengaktifan kembali poskamling  Adanya anggaran pembinaan LINMAS dari desa untuk peningkatan kapasitas
2	MISI III Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Data penerima bantuan sosial yang kurang valid  Belum optimalnya pemutakhiran	Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos  Adanya sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			data masyarakat fakir dan miskin	(SIKS - NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2019 di setiap desa
3	MISI IV Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Penggratisan biaya pengelolaan dokumen kependudukan  Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan
		Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Pandangan sebelah mata terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan	Penyusunan perencanaan kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi  Peningkatan SDM kecamatan terhadap pengelolaan data dan informasi
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten  Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan  Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam	Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan  Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			memberikan pendampingan mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat	
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa
4	MISI VI Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha  Banyaknya izin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan	Penggratiskan biaya pengurusan izin usaha selain IMB  Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi

Dari hasil telaahan tersebut dapat dilihat adanya faktor - faktor penghambat dan pendorong dari dalam Kecamatan Trangkil sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial kemasyarakatan.

Ketercapaian Program Kepala daerah yang menjadi kewajiban Kecamatan Trangkil untuk mendukungnya sesuai dengan keselarasan program di kecamatan sebagaimana berikut :

1. **Program masyarakat yang tertib, bersosial dan bermartabat** didukung oleh Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
2. **Program pemberdayaan masyarakat miskin** didukung oleh Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dan Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan.
3. **Program pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM** yang kompeten didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengembangan data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa.
4. **Program investasi daerah** didukung oleh program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

### 3.3 Telaahan RENSTRA Perangkat Daerah

Telaahan terhadap RENSTRA Perangkat Daerah yang searah atau didukung oleh Kecamatan Trangkil ada 5 (lima) perangkat daerah kabupaten, telaah berfungsi untuk mencari factor - factor penghambat dan pendorong dari dalam Kecamatan itu sendiri. Perangkat daerah juga merupakan pengampu urusan yang wajib menyusun RENSTRA Perangkat Daerah, hasil dari perencanaan mereka ditelaah dengan batasan kesesuaian tujuan, sasaran dan program di Kecamatan Trangkil sebagai berikut :

#### 1. SATPOL PP :

Tujuan Persentase Penanganan Pelanggaran K3.

Sasaran Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal dengan indikator Persentase Personil Linmas yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

#### 2. DISPERMADES :

Tujuan Indek Desa Membangun (IDM).

Sasaran Indek Ketahanan Sosial, Indek Ketahanan Ekonomi, Indek Ketahanan Lingkungan.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif.

3. BAPPEDA :

Tujuan dari Persentase Realisasi Capaian RPJMD.  
Sasaran Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD dan Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD.  
Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Pemsosbud yang tertampung dalam Renja dan program Pengembangan Data/Informasi dengan indikator Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

4. DPMPTSP :

Tujuan Pertumbuhan Investasi Daerah.  
Sasaran Lama Proses Perizinan.  
Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator prosentase Kesesuaian Perizinan.

5. DISPENDUKCAPIL

Tujuan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Kependudukan.  
Sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pencatatan Sipil.  
Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Peningkatan Kepemilikan KTP, Persentase Kepemilikan KK dan Persentase Keterangan Pindah Datang.

Dilihat dari sisi sasaran perangkat daerah dapat ditelaah sesuai kompetensi yang mampu dilaksanakan oleh Kecamatan Trangkil sebagai bentuk dukungan guna ketercapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah saat periode RPJMD tahun 2017 – 2022, telaah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel III.6  
Telaah RENSTRA Perangkat Daerah

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Kurang maksimalnya Rasio Poskamling dan rasio anggota Linmas	Kurang pedulinya masyarakat akan arti pentingnya poskamling dan Linmas	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas dan pengaktifan poskamling
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa	Belum aktifnya LPMD, PKK, Karang taruna, RT/RW dan Posyandu di desa	Kurang antusiasme masyarakat dalam mengaktifkan lembaga desa  Kurang peran yang diberikan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat	Adanya anggaran yang memadai untuk operasional lembaga desa  Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan masyarakat
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan  Masih sedikit masyarakat yang memahami tata laksanaan dan ketentuan pengusulan kebutuhan masyarakat	Fasilitasi dari kecamatan terhadap pelaksanaan penjangangan dan musrenbang  Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan  Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan
	Persentase desa tertib administrasi pengelolaan keuangan	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai	Kurangnya kompetensi SDM pengelola administrasi keuangan desa	Adanya Pendampingan/pelatihan/bintek dalam penyelesaian

Tabel III.6  
Telaah RENSTRA Perangkat Daerah

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Kurang maksimalnya Rasio Poskamling dan rasio anggota Linmas	Kurang pedulinya masyarakat akan arti pentingnya poskamling dan Linmas	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas dan pengaktifan poskamling
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa	Belum aktifnya LPMD, PKK, Karang taruna, RT/RW dan Posyandu di desa	Kurang antusiasme masyarakat dalam mengaktifkan lembaga desa  Kurangya peran yang diberikan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat	Adanya anggaran yang memadai untuk operasional lembaga desa  Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan masyarakat
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kurangya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan  Masih sedikit masyarakat yang memahami tata laksanakan dan ketentuan pengusulan kebutuhan masyarakat	Fasilitasi dari kecamatan terhadap pelaksanaan penjangaran dan musrenbang  Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan  Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan
	Persentase desa tertib administrasi pengelolaan keuangan	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai	Kurangya kompetensi SDM pengelola administrasi keuangan desa	Adanya Pendampingan/pelathan/bintek dalam penyelesaian



NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
		ketentuan yang diberlakukan	Sistem administrasi yang sudah aplikasi	proses administrasi keuangan
4	Lama Proses Perizinan	Belum maksimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat	<p>Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha</p> <p>Kurangnya tenaga di kecamatan untuk menunjang proses pelayanan</p>	<p>Penggratiskan biaya pengurusan izin usaha skala kecil selain IMB</p> <p>Kecamatan memiliki Kewenangan perijinan skala kecil</p> <p>Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi</p> <p>Sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perijinan dan manfaat perijinan</p>
5	Persentase Surat Keterangan Pindah Datang, KK, dan KTP	Belum maksimalnya pelayanan surat keterangan pindah datang, pelayanan kartu keluarga, pelayanan kartu tanda penduduk kepada masyarakat	<p>Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya administrasi kependudukan</p> <p>Hasil dari pelayanan yang tidak langsung didapatkan oleh masyarakat karena hanya sebatas rekam data</p> <p>Tidak adanya</p>	<p>Penggratiskan biaya pengurusan surat pindah datang</p> <p>Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>Adanya</p>

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
			alat cetak KTP di Kecamatan	sosisalisasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan

Dari hasil telaah tersebut penghambat yang timbul dari dalam akan dijadikan salah satu acuan dalam penentuan isu strategis Kecamatan Trangkil selain tantangan dari bab sebelumnya, dan pendorong yang dimiliki akan dijadikan pedoman strategi dalam penyelesaian hambatan.

### 3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari hasil telaah KLHS terhadap isu KLHS terkait aspek sosial dalam hal ini kemiskinan jika diselaraskan dengan program di Kecamatan Trangkil dapat dilihat perumusan penghambat dan pendorong yang ada sebagai berikut :

Tabel III.7  
Telaah KLHS terhadap Kecamatan Trangkil

No.	Isu KLHS	Program Kecamatan	Penghambat	Pendorong
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum sepenuhnya tugas dan fungsi LPMD diberdayakan oleh pihak desa</li> <li>1. Pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan LPMD akan kurang selaras dengan kebutuhan dalam peningkatan ekonomi desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa</li> <li>2. Adanya kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa dari Pemerintah Daerah</li> </ol>
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses perizinan usaha	Program peningkatan iklim investasi menjadi salah satu sasaran kecamatan dalam perencanaan

Hasil telaah KLHS terkait isu yang bisa ikut didukung penyelesaiannya oleh Kecamatan Trangkil akan berguna sebagai penyumbang masukan dalam perumusan isu dan penentuan strategi yang akan diimplementasikan dalam program/kegiatan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan merupakan gabungan masalah masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lam. Penentuan isu - isu strategis tidak lepas dari adanya hasil analisis dan telaah pada Visi dan misi, RENSTRA OPD yang terkait dengan perencanaan Kecamatan Trangkil dan KLHS, hasil analisis dan telaah yang dapat diambil adalah :

**TABEL III.8**  
**HASIL ANALISA, TELAHAH DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN**

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
1	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Trangkil yang mampu mempengaruhi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling dan fungsi dari LINMAS</li> <li>2. Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Trangkil</li> </ol>
2	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD</li> <li>2. Pemerataan pembangunan penunjang perekonomian</li> <li>3. Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati</li> <li>4. Pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan LPMD akan kurang selaras dengan kebutuhan dalam peningkatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social untuk mencapai/menjadi desa mandiri</li> <li>2. Kurang antusiasme masyarakat dalam mengaktifkan lembaga desa</li> <li>3. Kurangnya peran serta yang diberikan/dimanfaatkan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat</li> </ol>

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
		ekonomi desa 5. Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga 6. Kesejahteraan yang sesuai bagi koordinator ditingkat terendah (RT/RW) belum ada perhatian/kebijakan dari pemerintah 7. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata 8. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	
	Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Verifikasi akhir pendataan masyarakat miskin oleh pemerintah pusat	1. Data penerima bantuan sosial yang kurang valid 2. Belum optimalnya pemutakhiran data masyarakat fakir dan miskin
	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan  Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan  Hasil dari pelayanan yang tidak langsung didapatkan oleh masyarakat karena hanya sebatas rekam data  Tidak adanya alat cetak KTP di Kecamatan
	Belum optimalnya	Banyaknya penambahan	Pandangan sebelah mata

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
	tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	data dan perubahan yang sering diamanatkan oleh pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat	terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan
	Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	<p>1. Definisi operasional tentang program/kegiatan di perangkat daerah dirumuskan lebih jelas</p> <p>1. Ketatnya proses verifikasi usulan kecamatan oleh OPD pengampu kegiatan</p>	<p>Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan kebutuhan prioritas</p> <p>Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam memberikan pendampingan mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat</p>
	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	Sistem pengelolaan keuangan dengan aplikasi	Kurangnya kompetensi SDM pengelola administrasi pengelolaan keuangan desa
	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	<p>Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi</p> <p>Adanya Pengawasan dan evaluasi terhadap masa berlaku perizinan dari OPD terkait</p> <p>Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi</p>	<p>1. Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha</p> <p>2. Banyaknya ijin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan</p> <p>3. Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha</p> <p>4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses perizinan usaha</p> <p>5. Kurangnya tenaga di kecamatan untuk menunjang proses pelayanan</p>

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan sub isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan antara lain:

- 1) Kondusivitas pengurusan perizinan (misi VI)
- 2) Derajat Keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi (misi I)
- 3) kesejahteraan selanjutnya adalah Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Kelompok rentan dapat merujuk pada kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga rentan miskin, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan karena relasi gender yang belum setara dan adil. (misi III)
- 4) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi (*e-Government*)(misi IV administrasi kependudukan)
- 5) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan(misi IV perencanaan dan data)

Dari hasil penyelarasan tersebut tersirat adanya kesamaan permasalahan di Kecamatan Trangkil dengan sub permasalahan daerah, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis yang nantinya akan dijabarkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Perumusan isu - isu strategis untuk Kecamatan Trangkil adalah sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Trangkil serta koordinasi dengan dinas terkait dalam mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
2. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban wilayah kecamatan dalam mendukung peningkatan perekonomian dan investasi;
3. Isu terkait peningkatan kualitas pembangunan (Kecamatan dan desa) serta lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Isu terkait penguatan kelompok rentan dan penyeteraan gender.





## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Trangkil**

Tujuan Kecamatan Trangkil yang diambil merupakan konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Pati periode tahun 2017 - 2022, dimana tujuan RENSTRA diambil dari sasaran RPJMD, perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Trangkil dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :

- 1) Misi I yaitu meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. Tujuan terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.

Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

- 2) Misi III yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Sasaran meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

- 3) Misi IV yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik.

Tujuan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah

kecamatan. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan, terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

- 4) Misi VI yaitu meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.

Tujuan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan.

Penjabaran tujuan dan sasaran dari visi dan misi dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Trangkil selama lima tahun akan diterapkan dalam perencanaan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel IV.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN TRANGKIL**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi I : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal								
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kampling aktif	60%	63%	66%	70%	75%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase anggota Linmas aktif	60%	65%	70%	75%	77%
Misi III : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan								
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.		Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0,65	0,65	0,75	0,66	0,67
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,75	0,71	0,74	0,76	0,77
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62
			Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,59	0,59	0,60	0,60	0,61
1		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%
Misi IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%	75%	80%	85%
			Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten	6%	8%	9%	11%	12%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6%	8%	9%	11%	12%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	90%	90%	91%	92%	93%
Misi VI : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri								
4	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan		Pertumbuhan pemohon Paten	40	45	50	55	60
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Trangkil, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2018 - 2022.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Trangkil

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi. Berdasarkan peluang dan pendorong yang didapatkan dari analisa pada Bab II dan telaah pada Bab III terhadap permasalahan yang ada akan dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel V.1  
Peluang dan Pendorong penentuan Strategi dan Arah Kebijakan

NO	PELUANG	PENDORONG
1	Adanya Sinergitas dengan SATPOL yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan LINMAS	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas dan pengaktifan poskamling
2	1) Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2) DISPERMADES mempunyai	1) memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri

NO	PELUANG	PENDORONG
	<p>target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa</p> <p>3) Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES</p> <p>4) Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet</p> <p>5) Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES</p> <p>6) Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif merupakan target kinerja bagi DISPERMADES</p> <p>7) Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat</p>	<p>2) Anggaran yang memadai untuk operasional lembaga desa</p> <p>3) Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan masyarakat</p> <p>4) Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos</p> <p>5) Adanya sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS - NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2019 di setiap desa</p>
3	<p>1) Adanya pembekalan pembelajaran bagi fasilitator penjangkaran usulan kegiatan</p> <p>2) Adanya program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam RKPd</p> <p>3) Tersedianya base data dari BAPPEDA dan DISKOMINFO yang dapat dijadikan acuan data</p> <p>4) Terbitnya Permendagri tentang satu data Indonesia</p>	<p>1) Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan</p> <p>2) Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)</p> <p>3) Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa</p> <p>4) Penyusunan perencanaan kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi</p>

NO	PELUANG	PENDORONG
		5) Peningkatan SDM kecamatan terhadap pengelolaan data dan informasi 6) Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan 7) Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan
4	1) Pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro 2) Kesesuaian Perizinan merupakan prioritas kinerja program dari DPMPTSP	1) Penggratiskan biaya pengurusan izin usaha selain IMB 2) Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi 3) Penggratiskan biaya pengurusan dokumen kependudukan 4) Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan 5) Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan perijinan skala kecil 6) Sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perijinan dan manfaat perijinan
5	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP	1) Penggratiskan biaya pengurusan surat pindah dating 2) Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan 3) Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban terhadap administrasi kependudukan

Dari peluang dan pendorong yang ada dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan lima tahunan Kecamatan Trangkil akan dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan dari penjabaran tujuan dan sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Trangkil dapat dirumuskan sebagai berikut :



**Tabel V.2**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Visi : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik

Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kecamatan	1. Peningkatan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.

Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 2. Pengikutsertaan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sesuai tugas dan fungsinya
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	1. Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	1. Percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra dan PKH) dalam upaya mendukung penanggulangan

		2. Peningkatan koordinasi bantuan keagamaan penunjang ibadah masyarakat di wil. Kecamatan	kemiskinan. 2. Pelaksanaan evaluasi bagi masyarakat penerima bantuan kemiskinan 3. Optimalisasi dan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan keagamaan
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan kecamatan di segala aspek	1. Peningkatan SDM pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1. Pengembangan sistem data dan informasi 2. Optimalisasi sistem dan program perencanaan pembangunan	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi 2. Peningkatan keterisian data monografi dan profil kecamatan 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 2. Perumusan kegiatan sesuai kewenangan dan kemampuan OPD dalam melaksanakan kegiatan

	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan system dan tata kelola administrasi Keuangan Desa	1. Peningkatan SDM pengelola administrasi keuangan desa 2. Optimalisasi standar pelaporan administrasi keuangan desa
Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Optimalisasi pelayanan dan system pelayanan perizinan terpadu di Kecamatan	1. Peningkatan SDM pelayanan perijinan 2. Pelayanan gratis kepada masyarakat yang mengajukan perizinan

Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Trangkil dalam penyusunan perencanaan tahunan/RENJA perangkat daerah karena hal tersebut merupakan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 5.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan 5 (lima) tahunan, instrumen kebijakan tersebut berisi beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Trangkil untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan dukungan alokasi anggaran sebagai bentuk legalitas atas diusulkan/dilaksanakannya kegiatan tersebut pada RENJA perangkat daerah. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk merialisasikan arah kebijakan yang sudah ditentukan, oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati**  
**Tahun 2018-2022**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Tar get	Rp.		
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi yg tertangani	100%	100 %	238.889	100 %	284.187	100 %	297.604	100 %	343.430	100 %	380.121	100 %	1.368.050	Kecamatan Trangkil	
		4.08.4080.2.01.001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani selama setahun	350 surat	250	1400	450	1524	450	2520	480	480	50	480	2230	9568	Kecamatan Trangkil	
				Jumlah arsip dinamis	8 jenis	8		8		8		8		8		40			
		4.08.4080.2.01.002	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun	36 rekening	36	22.200	36	22.200	36	22.200	36	22.200	36	22.200	180	110.400	Kecamatan Trangkil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penerima Dana di Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana	
						Tar. Ect	Rp.	Tar. Ect	Rp.	Tar. Ect	Rp.	Tar. Ect	Rp.	Tar. Ect	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional atau lapangan	9 serdar dinas	9	2.600	8	2.350	9	2.700	11	3.000	11	3.000	55	14.700	Kecamatan Trangkil	
		4.08.4080.2.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	140 rim	140	24.629	145	23.267	150	24.098	155	29.681	160	29.821	750	131.596	Kecamatan Trangkil	
						973 buah	973	980	985	990	995	995	995	995	995	4.023			
						40 botol	40	43	43	43	43	43	43	43	43	223			
						22 das	22	23	25	25	25	25	25	25	25	136			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.011	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	800 buah	800	7.339	800	8.564	800	8.848	800	9.125	800	12.023	4.000	46.099	Kecamatan Trangkil	
					50 buku	50		50		50		50		50		250			
					20.000 lembar	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		100.000			
		4.08.4080.2.01.012	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55 buah	56	7.580	60	7.785	60	8.067	60	8.301	60	10.696	306	42.429	Kecamatan Trangkil	
		4.08.4080.2.01.013	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	24 unit	24	7.580	24	7.800	24	8.000	24	8.240	24	8.400	120	40.020	Kecamatan Trangkil	
		4.08.4080.2.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 eksemplar	24	3.063	24	1.386	24	1.386	24	3.200	24	3.400	108	12.435	Kecamatan Trangkil	

Tujuan	Bantuan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5					
						Tar. Get.	Rp.	Tar. Get.	Rp.	Tar. Get.	Rp.	Tar. Get.	Rp.	Tar. Get.	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	2018		2019		2020		2021		2022		-17	-18	-19	-20
						3.600 liter	3.660	36.784	3.650	36.672	3.900	33.212	4.200	40.416	4.200				
						150 doz	150	140	150	160	170	720							
						72	72	72	75	80	85	394							
						90 kg	90	90	90	90	100	460							
						90 pak	90	90	90	90	90	460							
						12 notulen rapat	12	12	12	12	12	60	973.715						
						297 laporan pertajahan	297	315	540	562	575	3.587							
						3 orang/bulan (selama 12 bulan)	36	45.133	36	56.755	36	64.489	36	59.216	180	209.420			
						4.08, 4.080, 2.01, 019		78.815	36	56.755	36	64.489	36	59.216	180	209.420			
						Kegiatan: Berpakaian Jasa tenaga pendukung administrasi/etika/keamanan													
						Jumlah jasa layanan umum													
						Jumlah notulen rapat koordinasi dan pelaksanaan koordinasi ke luar daerah													



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awa Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5								
						Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.							
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
							12	13.600	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000	60	60.000	60	60.000
4.08.02	4.08.02	4.08.02	Kegiatan penyediaan pendukung administratif pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kemangan SKPD	12 dokumen	12	12	16.804	12	16.900	12	20.000	12	21.000	12	22.000	60	96.754	60	96.754	Kecamatan Trangkil	
							12		12		12		12		12		60		60		60	
4.08.03	4.08.03	4.08.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam keadaan baik	65%	70%	84.893	73%	82.902	76%	107.106	78%	115.019	80%	126.593	80%	516.213	80%	516.213	Kecamatan Trangkil		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (kecuali Kegiatan (Output))	Data Capaian pada Tahun Ajaran Perencanaan	Target Kinerja Program dan Rencana Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Akhir Periode Rencana	
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.			Tar get	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		408.4 0802. 02.00 02.01 5	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	2	40.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	6	120.000	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0802. 02.00 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	1	9.600			4	5.400	5	10.000	4	16.000	13	31.400	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0802. 02.00 9	Pengadaan perubahan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit					1	12.000	2	13.000	1	14.000	4	39.000	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0802. 02.01 D	Pengadaan Mebelur	Jumlah mebel	5 unit	3	13.138	65	18.577	25	18.400	10	11.747	15	17.000	51	65.521	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0802. 02.01 7	Pengadaan peralatan computer dan keengkapannya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	1	10.000	1	10.000	1	3.000	1	10.000	1	6.000	5	43.000	Kecamatan Trangkil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar Get	Rp	Tar Get	Rp	Tar Get	Rp	Tar Get	Rp	Tar Get	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		408.4 0802. 02.02 1	Pembelajaran rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pembelajaran rutin/berkala gedung kantor	1 unit pembelajaran				1.250				1.525		1.650	4	7.335	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0802. 02.02 2	Pembelajaran rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pembelajaran rutin/berkala gedung kantor	2 unit pembelajaran	3	10.233	2	8.835	2	8.600	3	8.948	2	10.306	33	43.433	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0802. 02.02 4	Pembelajaran rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah pembelajaran dan pertemuan kendaraan dinas operasional atau lapangan	9 unit pembelajaran	8	24.600	11	24.462	13	36.356	12	31.799	12	41.337	26	104.242	Kecamatan Trangkil	
		4.08. 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Perentase ASR yang meningkat bedalibumanya	85%	90%	8.000	91%	15.000	92%	16.850	93%	18.235	94%	23.438	94%	91.523	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0802. 03.00 2	Kegiatan pelatihan/pelaksanaan tugas beserta kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Berata Attribut Kelengkapan	20 unit	20	8.600	27	11.500	27	13.600	27	14.000	27	28.760	120	73.280	Kecamatan Trangkil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		
						Tar get	Rp-	Tar get	Rp-	Tar get	Rp-	Tar get	Rp-	Tar get	Rp-					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
		408.4 0902. 03.00 0	Kegiatan pembinaan kegiatan ASST	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bervestasi Tugas dan Fungsi	12 Laporan															
		408. 06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaksanaan kinerja dan keuangan yang diwajibkan	100%	160 %	3.118	100 %	4.328	100 %	7.000	100 %	8.165	100 %	11.100	100 %	35.735	Rencana 6 Triwulih		
		408.4 0902. 06.00 1	Pengusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja PD Jumlah data kinerja yang terisi Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	12 Laporan 18 data	12 18	1.548	12 18	1.900	12 18	1.000	12 18	2.015	12 18	3.075	60 90	8.538	Kecamatan Trangkil		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian n pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Rendiel Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Tar Rp	Est	Tar Rp	Est	Tar Rp	Est	Tar Rp	Est	Tar Rp	Est			Tar Rp	Est
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		408.4 0902 06.00 5	Perencanaan pelaksanaan kegiatan akhir tahun rencana kerja SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan akhir tahun	1 laporan	1	202	1	425	1	1.000	1	1.100	1	1.210	5	4.007	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0902 06.00 6	Perencanaan rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (PKA) SKPD	2 dokume n	2	1.167	2	2.000	2	3.300	2	4.500	2	4.300	8	10.400	Kecamatan Trangkil	
		408.4 0902 06.01 0	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (PKA) SKPD	1 dokume n	1		1	1.000	1	1.500	2	2.400	2	4.300	5	3.500	Kecamatan Trangkil	
					1 dokume n	1		1		1	2.300	1		1	3.500	2	3.500	Kecamatan Trangkil	

Tujuan	Susunan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Aseel Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja dan Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Rendial Kinerja pada Akhir Periode Rencana			
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Prioritas 1						400.936		372.140		412.796		452.409		501.663		2.093.625					
URUSAN PERENCANAAN																					
URUSAN PEMERINTAHAN																					
BUDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEKERJA RTAWALAN)																					
				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)		100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	177.248				
				Perentase penangguhan pelaksanaan K3 di kecamatan		100%	24.900	100	22.250	100	22.250	100	43.123	100	44.725	100	177.248				Rencana
				Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertarikan dan		58%	24.900	60%	22.250	60%	22.250	70%	43.123	75%	44.725	75%	177.248				TargetK3
				Perentase Pelembangan aktif		50%	60%	65%	60%	65%	70%	70%	70%								

Tujuan	Rencana	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Aspek Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana								
						Tar	Rp.	Tar	Rp.	Tar	Rp.	Tar	Rp.	Tar	Rp.											
						Get		Get		Get		Get		Get				Rp.								
-1	0	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20						
			4.08.16	Program Penelibaran dan Pencegahan Stok kriminal	Rasio Poombung	3,5	4,50	24.900	0,09	32.250	0,06	33.250	0,06	43.133	0,30	44.725	0,50	177.248			Kecamatan Tinjau					
			4.08.16.016	Koordinasi upaya Penyelenggara an pengamanan dan ketiduran umum	Rasio Homas	0,03	0,03	12	24.950	0,03	5	12	32.250	0,04	12	42.123	0,04	5	12	44.725	60	177.248	Kecamatan Tinjau			
				Jumlah laporan/gaper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pengamanan dan ketiduran umum	Jumlah laporan	1	12	12	24.950	12	12	32.250	12	42.123	12	44.725	60	177.248								
				Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	0,0400	0,46	40	35.819	0,65	80	44.174	0,06	00	44.797	0,66	50	60.839	0,47	00	80.604	0,47	00	237.233	Kecamatan Tinjau	
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian dan pada Tahun Areal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Uraian Kerja Perencana dan Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Kemasyrakatan di wilayah kecamatan	Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan				0,7900	0,7950	26.819,50	0,7400	44.174,00	0,7350	48.797,50	0,7050	60.839,00	0,7700	80.604,00	0,7700	237.233,00	Kecamatan Tangkul	
		4.08.16	Program Penanggulangan Kebersihan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,5900	0,6000	36.819,00	0,6100	44.174,00	0,6200	48.797,50	0,6300	60.839,00	0,6400	80.604,00	0,6400	237.233,00		
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,3500	0,3600	36.819,00	0,3700	44.174,00	0,3800	48.797,50	0,3800	60.839,00	0,3900	80.604,00	0,3900	237.233,00		
				Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	30%	190%	36.819,00	100%	44.174,00	100%	48.797,50	100%	60.839,00	100%	80.604,00	100%	237.233,00		
				Persentase IPMD aktif															



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
				Persentase PKK desa aktif	80%	83%		85%		87%		90%		93%		93%			
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	45%		48%		50%		53%		55%		55%			
				Persentase RT/RW aktif	70%	72%		73%		76%		79%		83%		83%			
				Persentase Posyandu aktif	75%	79%		82%		85%		88%		90%		90%			
		408.4060.2.18.004	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	25.819	12	44.174	12	45.797	12	60.839	12	80.604	60	237.233	Kecamatan Trangkil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tertarget Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana	Luas Wilayah Sasaran	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5					Rendahnya Kinerja pada Akhir Periode Rencana
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				Tar get
1	Terbuka hanya penyuluh dan bantuan kepada masyarakat	4.01.22	Program Koordinasi Peningkatan dan Rehabilitasi Wilayah Kecamatan Tanaqaki	Persentase penyuluhan pasif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	143.694	Kecamatan Tanaqaki	19	20
				Persentase penyuluhan aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	143.694	Kecamatan Tanaqaki	19	20
				Persentase penyuluhan PNI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	143.694	Kecamatan Tanaqaki	19	20
				Persentase penyuluhan Bantuan kesehatan (rumah ibadah, takmir/dit)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	143.694	Kecamatan Tanaqaki	19	20

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Trangkil	Lokasi			
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Tar. Ket	Rp.	Tar. Ket	Rp.	Tar. Ket	Rp.	Tar. Ket	Rp.	Tar. Ket	Rp.					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Terwujudnya pelayanan prima yang berkualitas dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan yang langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Trangkil		406.4080.272.001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penggunaan anggaran dan kerangka di wilayah Kecamatan Trangkil	Jumlah laporan hasil monitoring dan pemantauan penyelenggaraan penggunaan anggaran dan kerangka di wilayah Kecamatan Trangkil	-- Laporan	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						52%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	
						22.810	23.186	24.865	27.396	29.817	38.465	143.594	Kecamatan Trangkil							
Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Trangkil																				
Persentase Realisasi Capaian RKPD																				
Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten																				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Fundasi										Uraian Kerja Perencanaan Daerah Perangung Jawab	Lokasi				
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana			
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
-1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi real kependudukan di Kecamatan	4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100 %	1.956	100 %	80.892	100 %	52.879	100 %	60.208	100 %	68.558	100 %	117	234.133	Kecamatan Transkail	-19	-20
		4.08.17	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	5400	60 %	1.956	65 %	50.892	70 %	52.879	75 %	60.208	80 %	68.558	80 %	117	234.133	Kecamatan Transkail		
	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi			Persentase ketersediaan data geografis dan profil Kecamatan Transkail	50%	60%	2.577	65%	16.950	70%	18.325	75%	11.723	80%	12.073	80%		58.447			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Tar. Ket	Rp.	Tar. Ket	Rp.	Tar. Ket	Rp.	Tar. Ket	Rp.	Tar. Ket	Rp.			Tar. Ket	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan	4.08.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data monografi Kecamatan Trangkil	75%	70%	2.577	75%	16.950	80%	15.325	85%	11.732	90%	13.073	90%	58.647	Kecamatan Trangkil	
		408.4080.2.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan Trangkil	Persentase ketersediaan data profil Kecamatan Trangkil	50%	60%		65%	18.965	60%	15.525	70%	11.732	75%	12.073	75%	58.647	Kecamatan Trangkil	
				Jumlah dokumen data Kecamatan (profil dan monografi) yang disusun selama setahun	2	2	1.577	3	18.965	3	15.525	3	11.732	3	12.073	10	58.647		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Pemasangan Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana		
						Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.	Tar. Get	Rp.			Tar. Get	Rp.	
-1	Terpenuhinya harapan dan informasi serta mendukung peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan	4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase satuan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	60%	6%	14.510	8%	23.186	9%	28.856	11%	37.396	12%	38.517	12	142.463	-18	-19	-20
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan Trangkil	80%	83%		85%		88%		91%		95%	95		Kecamatan Trangkil			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja & Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Tar Est	Rp.	Tar Est	Rp.	Tar Est	Rp.	Tar Est	Rp.	Tar Est	Rp.					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
	Terwujudnya daya terima administrasi oleh masyarakat desa	408.4080.2.19.009	Penyediaan dan Muatan RKPJ	Jumlah dokumen uraian rencana hasil Jaring Kemar dan Muatan Kecamatan	2 Dokumen	2	14.530	2	23.386	3	28.830	2	37.390	2	38.317	10	142.405		Kecamatan Trangkil	
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	6.636	92%	23.197	93%	25.297	94%	26.294	95%	31.305	95%	116.829			
		408.4080.2.19.004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	78%		78%		81%		80%		84%		80%				
				Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun selaras dengan	4 laporan / rekening resmi	4	6.636	4	23.197	4	23.297	4	30.294	4	31.305	20	116.829			Kecamatan Trangkil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Tar. Ket.	Rp.	Tar. Ket.	Rp.	Tar. Ket.	Rp.	Tar. Ket.	Rp.	Tar. Ket.	Rp.			Tar. Ket.	Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tranggil	Meningkatnya kualitas pelayanan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tranggil	4.06.20	Program Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Pemohon Paten	100%	100	10.056	100	42.007	100	50.498	100	31.423	100	32.265	100	166.346	Kecamatan Tranggil	
		408.4080.2.20.010	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kepada Kecamatan Tranggil	Persentase pelayanan permohonan yang terlayani	100%	100	10.056	100	42.007	100	50.495	100	31.423	100	32.265	100	166.346	Kecamatan Tranggil	
				Jumlah izin yang diterbitkan	60 dokumen izin	70	10.000	80	42.007	80	50.495	100	31.423	110	32.265	440	166.346	Kecamatan Tranggil	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
-1	-2	-3	-4 (PATEN)	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
<b>PRIORITAS III</b>							309.440		275.978		306.129		335.538		372.026		1.480.003		
<b>JUMLAH P-I DAN P-III</b>							490.860		669.382		742.512		813.820		902.345		3.461.385		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Trangkil yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagai tujuan dalam RENSTRA Kecamatan Trangkil yang diturunkan ke dalam sasaran dan program dengan indikator serta target kinerja yang sudah ditentukan dengan formula yang terukur, indikator kinerja ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahu n 1	Tahu n 2	Tahu n 3	Tahu n 4	Tahu n 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.							
	Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.							
	<b>INDIKATOR TUJUAN 1</b>							
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 1 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahu n 1	Tahu n 2	Tahu n 3	Tahu n 4	Tahu n 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Persentase pos kamplang aktif	58%	60%	63%	66%	70%	75%	75%
	Persentase anggota Linmas aktif	55%	60%	65%	70%	75%	77%	77%
	Sasaran Program : Terwujudnya Kantarantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kecamatan							
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio pos kamplang aktif	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,5	5,5
	Rasio anggota Linmas aktif	0,03	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035	0,035
	Misi 3 :Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan							
	Tujuan : Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan							
2	INDIKATOR TUJUAN 1							
	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.64	0.656	0.752	0.762	0.767	0.770	0.770
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (9)
			Tahun n 1 (4)	Tahun n 2 (5)	Tahun n 3 (6)	Tahun n 4 (7)	Tahun n 5 (8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran : Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan							
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.740	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.770
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.590	0.600	0.605	0.610	0.615	0.620	0.620
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.580	0.590	0.595	0.600	0.605	0.610	0.610
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Sasaran Program : Meningkatkan kelikutsertaan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan							
	Persentase LPMD aktif	25%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
	Persentase PKK desaaktif	70%	80%	82%	85%	86%	88%	88%
	Persentase Karang Taruna aktif	30%	40%	44%	48%	58%	60%	60%
	Persentase RT/RW aktif	60%	70%	73%	76%	78%	79%	79%
	Persentase Posyandu aktif	70%	75%	78%	80%	83%	87%	87%
	Sasaran2 :Persentase total ketercapaian penyuluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (9)
			Tahu n 1 (4)	Tahu n 2 (5)	Tahu n 3 (6)	Tahu n 4 (7)	Tahu n 5 (8)	
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
(1)								
	Indikator							
	INDIKATOR SASARAN 2							
	Percentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Program 2 :							
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan							
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan							
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan keagamaan penunjang kebutuhan ibadah masyarakat di wilayah Kecamatan							
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 2 :							
	Persentase penyaluran rastra	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran PKH	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahu n 1	Tahu n 2	Tahu n 3	Tahu n 4	Tahu n 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir, dll)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik							
	Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan							
3	INDIKATOR TUJUAN 3							
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	52%	60%	55%	70%	75%	80%	80%
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan							
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentas e pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (9)
			Tahu n 1 (4)	Tahu n 2 (5)	Tahu n 3 (6)	Tahu n 4 (7)	Tahu n 5 (8)	
(1)	(2) kependudukan tepat waktu							(9)
	Sasaran Program 1 : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kecamatan (KTP, KK)							
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 2: Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan							
3.2	INDIKATOR SASARAN 2.1							
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
	Sasaran Program 2.1 :							
	- Tersedianya data monografi kecamatan							
	- Tersedianya data profil kecamatan							
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 2.1							
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahu n 1	Tahu n 2	Tahu n 3	Tahu n 4	Tahu n 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
3.3	INDIKATOR SASARAN 2.2							
	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPd kabupaten	4%	6%	8%	9%	11%	12%	12%
	Sasaran Program : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan							
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	75%	78%	80%	82%	82%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
	Sasaran 3 : Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa							
3.4	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa dengan administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
	Sasaran Program : terciptanya administrasi pengelolaan keuangan desa yang tertib							



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (9)
			Tahu n 1 (4)	Tahu n 2 (5)	Tahu n 3 (6)	Tahu n 4 (7)	Tahu n 5 (8)	
3.4.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
(1)								
	Indikator							
	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Percentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
	Percentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	88%	89%	90%	91%	92%	93%	93%
	Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri							
	Tujuan : Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan							
4	INDIKATOR TUJUAN 4							
	Pertumbuhan pemohon Paten	35	40	45	50	55	60	60
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan di kecamatan							
4.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Percentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Program : Percentase pelayanan							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (3)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (9)
			Tahu n 1 (4)	Tahu n 2 (5)	Tahu n 3 (6)	Tahu n 4 (7)	Tahu n 5 (8)	
(1)	perizinan yang terlayani (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**BAB VIII**  
**P E N U T U P**

Renstra Perubahan Kecamatan Trangkil dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi saat ini, serta masukan dari aspirasi masyarakat guna mendukung ketercapaian RENSTRA Kecamatan Trangkil.

Renstra Perubahan Kecamatan Trangkil Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi Kecamatan selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati.

Perubahan Renstra Kecamatan Trangkil tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilalui yaitu tahun 2018 dan 2019. Hasil pelaksanaan Perubahan Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Kecamatan Trangkil dalam merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan. Penyusunan Renstra Kecamatan Trangkil pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu serta perencanaan periode berikutnya guna mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

